

**PENGARUH PENGKOORIDINASIAN KERJASAMA DAERAH TERHADAP
EFEKTIVITAS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN SUMEDANG**

Yeyet Yulianti

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

E-mail: yulianti@gmail.com

ABSTRACT. *This research aims to obtain data and information on the Effect of Coordinating Regional Cooperation on the Effectiveness of Utilization of Regional Property in the Context of Increasing Regional Revenue in Sumedang Regency. In this article, what is discussed is about the coordination of regional cooperation, such as what is the effectiveness of the use of regional property and what kind of increase in local revenue in Sumedang Regency. The method used in this study is a descriptive analysis method, with there are three variables, namely the Coordination of Regional Cooperation as an independent variable, the Effectiveness of Utilization of Regional Property as an intermediate variable, and the Increase in Regional Original Income as the dependent variable. The population in this study was 226 employees in the Regional Government of Sumedang Regency. The number of samples used is based on the Slovin formula with a minimum number of 69 people. The sampling technique used was cluster random sampling with details of 4 Head of Divisions, 12 Head of Subdivisions, and 53 Implementers at the Regional Secretariat. Data collection techniques in this study were by distributing questionnaires containing various statements to respondents. The measuring instrument used in the form of 54 statements relating to three variables. The scale used is a Likert scale. The results of statistical calculations show that the level of Regional Cooperation Coordination is Good that is equal to 82.56, the level of Effectiveness of Utilization of Regional Property is Good which is equal to 81.05%, the level of Increasing Local Revenue is Good that is equal to 81.81%. The correlation between the Coordination of Regional Cooperation, the Effectiveness of Utilization of Regional Owned Goods and the Increase in Regional Original Revenues obtained 0.69 results. Based on research shows that the Coordination of Regional Cooperation (X) has a significant and positive effect on the Utilization of Regional Property (Y) in realizing the Increase of Regional Revenue in Sumedang Regency (Z) by 63.90%, while the rest (PYZ €) 2 is 14.10% is influenced by other variables outside the variable Effectiveness of Utilization of Regional Property and Increased Local Revenue in Sumedang Regency which is not included in the model.*

Keywords: *Coordinating regional cooperation, effectiveness of utilization of regional property*

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang handal guna mengarahkan, mendorong, memfasilitasi dan mengakomodasikan berbagai kepentingan dari segenap komponen masyarakat di daerah, sehingga diperlukan kondisi Pemerintah Daerah yang kondusif. Dalam menyikapi kondisi Pemerintah Daerah yang kondusif sebagaimana dimaksud, maka perlu disusun langkah-langkah yang tepat dengan terlebih dahulu

harus mampu mereformasi dirinya, yaitu dengan menata organisasi dan manajemen Pemerintah Daerah, meliputi kewenangan, kelembagaan, personalia maupun kinerja.

Penyelenggaraan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan pihak lain telah banyak dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Mitra kerjasama telah dilaksanakan dengan pemerintah melalui kementerian/lembaga non departemen, pemerintah provinsi,

pemerintah daerah, lembaga pendidikan, swasta termasuk dengan perorangan.

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Sejalan dengan hal itu, kerjasama daerah dapat menjadi salah satu sarana untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan di daerah juga sebagai percepatan bagi terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergitas dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan publik. Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pada pelaksanaannya tetap masih ditemukan berbagai masalah yang tidak bisa terlepas dari Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang disebabkan kurangnya pemahaman akan pentingnya Pengkoordinasian peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Adapun masalah yang muncul adalah Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang secara umum terkesan rendah yang akhirnya menghasilkan pemanfaatan yang rendah pula, diantaranya : pendayagunaan dan hasil guna atas yang belum dimanfaatkan. Barang milik daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak

yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut dapat mengganggu proses kerjasama daerah sehingga peningkatan pendapatan asli daerah masih rendah.

Pendapatan Asli Daerah sendiri merupakan sumber pendapatan yang penting untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD akan memberikan warna terhadap tingkat Otonomi Daerah, karena pendapatan daerah dapat digunakan bebas oleh daerah. Artinya penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya, sehingga secara prinsip pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya tidak berwenang untuk mengatur dan memanfaatkan penggunaan sumber pendapatan daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan. Akan tetapi saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Kabupaten Sumedang terkait dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli daerah yang bersumber dari dari Pendapatan Daerah.

Dengan koordinasi, memungkinkan adanya kesatuan, keterpaduan anatar unit, antar pejabat serta keharmonisan semua pegawai dalam kerjasama daerah terhadap pemanfaatan barang milik daerah. Sehingga penerimaan dari sektor pajak daerah tersebut benar-benar dapat dijadikan sebagai sumber utama bagi peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumedang. jika ini terwujud , maka

berimplikasi pada kemampuan Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan otonominya.

Kemudian pertanyaan masalah utama penelitian tersebut penulis rumuskan ke dalam sub-sub pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh Pengkoordinasian Kerjasama Daerah terhadap Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Kabupaten Sumedang?
2. Adakah pengaruh Pengkoordinasian Kerjasama Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang?
3. Adakah pengaruh Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang?

TINJAUAN PUSTAKA

Pendekatan administrasi negara sangat berhubungan dengan peranan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu untuk melaksanakan semua kegiatan diatas, aparatur pemerintahan dari setiap organisasi birokrasi, perlu melakukan koordinasi agar berbagai kebijakan negara dan pelaksanaan program pemerintah yang diberikan kepada unit-unit atau lembaga-lembaga pemerintahan dapat diwujudkan secara efisien. Mengingat pentingnya masalah koordinasi dalam pelaksanaan berbagai program pada suatu sektor atau antar sektor, terutama program yang memperoleh prioritas dan yang melibatkan berbagai departemen/lembaga, menurut Tjokroamidjojo (2003:106) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah:

1. Siapa atau badan/lembaga mana yang secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasikan program suatu sektor atau antar sektor.
2. Penyusunan program pelaksanaan apakah sudah baik dan jelas.

3. Prinsip fungsionalisasi dalam program pelaksanaan apakah sudah dituangkan ke dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
4. Hubungan kerjasama, apakah sudah dikembangkan dengan lebih baik.

Abdurachman (1998:58) memberikan definisi koordinasi sebagai kegiatan untuk menertibkan segenap kegiatan manajemen maupun kegiatan satu dengan yang lainnya agar tidak simpang siur, tidak bertentangan dan dapat ditunjukkan kepada titik arah pencapaian tujuan secara efisien. Sementara itu, Iskandar (2005:274) memberikan pengertian koordinasi sebagai proses penyatu -paduan pandangan terhadap sasaran-sasaran dan keserasian-keserasian kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi dan/atau dengan organisasi lainnya secara efisien. Kartasmita (1998:61) mengemukakan bahwa koordinasi adalah salah satu fungsi pokok dari manajemen pemerintahan diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi. Selain itu juga, koordinasi merupakan jawaban terhadap kebutuhan koordinasi.

Iskandar (2005:179) mengemukakan bahwa ada unsur-unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi, yaitu unit-unit atau organisasi-organisasi, sumber-sumber potensi, kesatupaduan, gerak kegiatan, keserasian, serta arah yang sama (sasaran).

Sebagai penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur koordinasi tersebut dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Unit-unit dalam organisasi mempunyai fungsi yang berbeda Organisasi-organisasi tersebut dapat berupa instansi pemerintah, organisasi swasta, ataupun badan usaha. Fungsinya mungkin sama, mungkin juga berbeda.

2. Sumber-sumber atau potensi yang ada pada unit-unit suatu organisasi atau pada organisasi-organisasi adalah tenaga kerja, keterampilan dan pengetahuan personilnya, teknologi, anggaran serta fasilitas kerja lainnya.
3. Gerak, kegiatan adalah segala daya upaya, segala sesuatu tindakan yang dikerjakan oleh pejabat-pejabat maupun organisasi kerja dalam melakukan tugasnya.
4. Kesatupaduan, artinya terdapat pertautan atau hubungan antara sesamanya sehingga mewujudkan suatu integritas atau suatu kesatuan yang kompak.
5. Keresasian, berarti adanya urutan-urutan pengerjaan sesuatu yang tersusun secara logis, sistematis atau dilakukan dalam waktu yang bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi (pengulangan), penjumlahan, maupun pertentangan.
6. Arah yang sama, dalam hal ini sebagai pedoman ialah sasaran yang sudah ditetapkan. Segala potensi itu diarahkan kesasaran yang satu itu juga, sehingga tak terjadi pertimbangan. Disinilah sebenarnya fungsi administrasi itu beroperasi mulai dari penetapan sasaran sampai dengan penilaian dan pengawasan.

Dengan demikian secara teoritis, redapat 3 (tiga) faktor yang berimplikasi kepada manajemen pemerintahan menurut paradigma penelitian keserasian. Ketiga faktor tersebut adalah:

1. Sistem administrasi pemerintahan sifatnya harus kongren, baik pada tingkat makro maupun pada tingkat mikro. Sistem administrasi pemerintahan harus fleksibel terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungannya, hal ini disebut model kontingensi yang integratif;
2. Ada pengaruh yang datang dari lingkungan internal melalui perilaku individu pendukung organisasi (para pejabat/manajer pemerintah dan

perilaku setiap kelompok). Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya suatu keserasian atau kecocokan eksternal organisasi;

3. Model kontingensi menyimpulkan bahwa sistem administrasi pemerintahan dalam suatu lingkungan yang berbeda membutuhkan keserasian diantara unit-unit organisasi intern yang ada didalamnya.

Efektivitas dan efisiensi organisasi menuntut adanya pembagian unit-unit dan penggolongan pekerjaan sehingga fungsi-fungsi organisasi menjadi terpisah. Namun. Demi efisien dan efektivitas pula maka diperlukan adanya koordinasi antar unit sehingga setiap gerakan organisasi akan terpadu. Pendapat Westra (1985) yang dikutip Iskandar (2005: 331) mengemukakan bahwa efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Menurut Effendy (2010:14), menjelaskan bahwa efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Susanto (2001: 156), memberikan definisi tentang efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Susanto tersebut, bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan (Kurniawan, 2010:109), dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik bahwa Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak

adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Menurut Halim (2007:113) intensifikasi adalah upaya, tindakan usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terrealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan, dalam APBD sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan diteliti. Sedangkan menurut Tunliu (2008:119) Intensifikasi PAD adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan diteliti. Menurut Halim (2008:147) intensifikasi retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk penerimaan retribusi daerah yang biasa diaplikasikan dalam bentuk perubahan tarif retribusi daerah, peningkatan pengelolaan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah

melalui sumber-sumber pajak dan retribusi daerah.

Menurut Tunliu (2008:117) bahwa usaha-usaha intensifikasi dalam hal retribusi daerah misalnya dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Menetapkan target atau tujuan atau wajib setor minimum (wasmin) kepada unit Dinas untuk setiap jenis retribusi daerah
2. Memperkuat proses pemungutan
3. Meningkatkan pengawasan
4. Meningkatkan kemampuan aparatur dinas
5. Mengadakan koordinasi secara internal dan eksternal baik vertikal maupun horizontal
6. Selalu meninjau dan mengajukan perubahan tarif yang dianggap kurang memadai dengan kenyataan.

Sedangkan upaya secara ekstensifikasi menurut Tunliu (2008:117) yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan Pengembangan dan menggali jenis-jenis pungutan yang baru
2. Mengadakan peninjauan terhadap perundang-undangan yang berlaku kemudian melakukan penyesuaian terhadap tarif sesuai dengan kemampuan masyarakat
3. Mengikuti studi banding ke daerah lain guna menambah wawasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat terwujud apabila didukung oleh Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang ditunjang oleh Pengkoordinasian Kerjasama Daerah. Sehubungan dengan proposisi tersebut penulis merumuskan anggapan dasar penelitian sebagai berikut:

1. Tugas pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang baik merupakan salah

satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah tujuan utama dari Pengkoordinasian Kerjasama Daerah.

METODE

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif berfungsi untuk memperoleh gambaran secara faktual tentang keadaan fenomena penelitian tertentu dalam keadaan sekarang untuk mencari jawaban bagi pemecahan-pemecahan masalah yang terdapat pada fenomena tersebut. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu Pengkoordinasian Kerjasama Daerah sebagai variabel bebas, Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai variabel antara, dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 226 orang pegawai di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang. Jumlah sampel yang digunakan berdasarkan rumus Slovin dengan jumlah minimum sebanyak 69 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random sampling dengan rincian sebanyak

4 orang Kepala Bagian, 12 orang Kepala Sub Bagian, serta 53 orang Pelaksana pada Sekretariat Daerah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Selain itu teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket berisi berbagai pernyataan kepada responden. Alat ukur yang digunakan berupa 54 pernyataan yang berkaitan dengan tiga variabel. Skala yang digunakan berupa skala likert berisi pernyataan positif dan negatif. Untuk pernyataan positif terdiri dari skala 5 (selalu) hingga skala 1 (tidak pernah). Untuk pernyataan negatif terdiri dari skala 1 (selalu) hingga skala 5 (tidak pernah). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Pearson Product Moment untuk melihat derajat hubungan dari setiap variabel dan path analysis untuk mengetahui besarnya pengaruh dari setiap variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengolah data yang didapat peneliti menggunakan kriteria penilaian berdasarkan persentase pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase

No	Persentase	Kriteria Penilaian
1.	20-35,99	Sangat Kurang Baik
2.	36-51,99	Kurang Baik
3.	52-67,99	Cukup Baik
4.	68-83,99	Baik
5.	84-100	Sangat Baik

Hasil pengolahan data dari angket yang berisi 54 pernyataan dan terbagi ke dalam tiga variabel yaitu pengkoordinasian kerja sama daerah (X), efektivitas

pemanfaatan barang milik daerah (Y), dan peningkatan pendapatan asli daerah (Z) dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengolahan Data Setiap Variabel

Variabel	Jumlah Pernyataan	Jumlah Komulatif	Persentase Rata-Rata (%)	Kriteria
X	25	2.064,06	82,56	Baik
Y	16	1.296,81	81,05	Baik
Z	13	1.063,48	81,81	Baik

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Pengkoordinasian Kerja sama Daerah (X) yaitu sebesar 82,56% dari seluruh pertanyaan pada variabel tersebut. Kondisi ini menunjukkan pada umumnya para responden memiliki persepsi bahwa Pengkoordinasian Kerja sama Daerah dapat

dinilai baik. Rata-rata jawaban responden pada variabel Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Y) yaitu sebesar 81,05% maka termasuk dalam kategori baik. Serta rata-rata jawaban responden pada variabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Z) sebesar 81,81% maka termasuk dalam kategori baik.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	t	Sig.	R Square
Hipotesis Utama			
Variabel X berpengaruh terhadap Y dalam Z	2,137	,036	,639
Sub Hipotesis			
Variabel X berpengaruh terhadap Y	10,886	,000	,639
Variabel X berpengaruh terhadap Z	14,439	,000	,554
Variabel Y berpengaruh terhadap Z	8,932	,000	,544

Berdasarkan pengujian pada hipotesis utama diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,05; 67}$) yaitu $t_{hitung} = 2,137 > t_{tabel} = 1,668$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pengkoordinasian Kerja sama Daerah (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Y) dalam mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang (Z). Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, dengan nilai *Koefisien Determinasi* (R^2_{YZX}) sebesar $=0,639$. Nilai ini menunjukkan bahwa Pengkoordinasian Kerja sama Daerah (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Y) dalam mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang (Z) sebesar 63,90%, sedangkan sisanya (P_{YZ})²

sebesar 14,10% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang yang tidak dimasukkan ke dalam model. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengkoordinasian Kerja sama Daerah telah mampu mempengaruhi Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang.

Pada sub hipotesis pertama, variabel X berpengaruh terhadap Y diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,05; 67}$) yaitu $t_{hitung} = 10,886 > t_{tabel} = 0,993$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pengkoordinasian Kerja sama Daerah (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah di

Kabupaten Sumedang (Y). Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, dengan besaran nilai *Koefisien Determinasi* (R^2_{YX}) sebesar = 0,639 Nilai ini menunjukkan bahwa Pengkoordinasian Kerja sama Daerah (X) berpengaruh terhadap Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Y) sebesar 63,90 %, sedangkan sisanya ($P_{Y\epsilon}$)² sebesar 31,20 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dimasukkan ke dalam model (epsilon). Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengkoordinasian Kerja sama Daerah secara partial telah mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Kabupaten Sumedang.

Pada sub hipotesis kedua, variabel X berpengaruh terhadap Z diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,05; 67}$) yaitu $t_{hitung} = 14,439 > t_{tabel} = 1,675$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pengkoordinasian Kerja sama Daerah (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Z). Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, besaran nilai *Koefisien Determinasi* (R^2_{ZY}) sebesar = 0,554 Nilai ini menunjukkan bahwa Pengkoordinasian Kerja sama Daerah (X) berpengaruh terhadap variabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Z) sebesar 54,10%, sedangkan sisanya ($P_{Z\epsilon}$)² sebesar 16,90% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang tidak dimasukkan ke dalam model (epsilon). Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengkoordinasian Kerja sama Daerah secara partial telah mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pada sub hipotesis ketiga, variabel Y berpengaruh terhadap Z diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,05; 67}$) yaitu $t_{hitung} = 8,932 > t_{tabel} = 0,993$ Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Efektivitas Pemanfaatan

Barang Milik Daerah berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Z). Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, dengan besaran nilai *Koefisien Determinasi* (R^2_{ZX}) sebesar = 0,544 Nilai ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Y) berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Z). Sebesar 54,40%, sedangkan sisanya ($P_{Z\epsilon}$)² sebesar 31,20. % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang tidak dimasukkan ke dalam model. Kondisi ini menunjukkan Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah secara partial telah mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Mengingat pentingnya masalah koordinasi dalam pelaksanaan berbagai program pada suatu sektor atau antar sektor, terutama program yang memperoleh prioritas dan yang melibatkan berbagai departemen/lembaga, menurut Tjokroamidjojo (2003:106) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah:

1. Siapa atau badan/lembaga mana yang secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasikan program suatu sektor atau antar sektor.
2. Penyusunan program pelaksanaan apakah sudah baik dan jelas.
3. Prinsip fungsionalisasi dalam program pelaksanaan apakah sudah dituangkan ke dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
4. Hubungan kerja sama, apakah sudah dikembangkan dengan lebih baik.

Secara etimologi istilah koordinasi mempunyai makna mengatur, dengan demikian dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan. Menurut manila (1996:39), bahwa: " koordinasi dengan hubungan kerja adalah dua

pengertian yang saling terkait, dengan kata lain koordinasi hanya dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang fektif". Sementara itu, pengertian hubungan kerja dijelaskannya sebagai bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi. Oleh karena itu, hasil akhir dari hubungan kerja ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efesien). Senada dengan pernyataan tersebut, Abdurachman (1998: 58) memberikan definisi koordinasi, sebagai berikut "Koordinasi sebagai kegiatan untuk menertibkan segenap kegiatan manajemen maupun kegiatan satu dengan yang lainnya agar tidak simpang siur, tidak bertentangan dan dapat ditunjukan kepada titik arah pencapaian tujuan secara efesien".

Fungsi koordinasi ini demikian pentingnya.apalagi bila organisasi harus berjalan sebagai suatu sistem, sebagai suatu sistem, sebagai suatu kesatuan yang bulat dari bagian-bagian (sub sistem) yang saling berhubungan, saling menunjang dan saling bergantung. Begitu pentingnya masalah koordinasi, sampai-sampai dikatakan oleh Koontz dan O'Donnell (dalam Manila, 1996: 40) bahwa: '*Coordination is the essence of managership*'. Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan (unit-unit) kerja organisasi, sehingga bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Effendy (2010:14), menjelaskan Efektivitas adalah "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan." Pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan demikian,

efektivitas suatu pemanfaatan barang dipengaruhi oleh koordinasi atau komunikasi yang terjadi agar tercapainya tujuan yang telah ditentukan oleh suatu lembaga tersebut. Sebagaimana didiutarakan dalam Iskandar (2012:337) bahwa suatu program akan berjalan secara efektif atau mempunyai efektifitas yang tinggi apabila didukung oleh sumberdaya manusia yang tangguh dan berdedikasi tinggi serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, mudah, lancar serta memiliki kesinambungan. Selain faktor tersebut hasil keluaran (*output*) sebagai dampak dari dikembangkannya program tersebut sangat memainkan peranan yang cukup penting. Program yang memberikan hasil atau kemanfaat yang cukup tinggi cenderung akan bertahan lama dan senantia mengalami perkembangan yang pesat sesuai dengan tuntutan dan kepentingan masyarakat.

PENUTUP

Terdapat beberapa simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dari arah deskriptif data penelitian:
 - a. Hasil pengujian hipotesis utama terdapat pengaruh pengkoordinasian kerjasama daerah terhadap efektifitas pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumedang.
 - b. Hasil pengujian parsial terhadap sub hipotesis terdapat pengaruh pengkoordinasian kerjasama daerah terhadap efektifitas pemanfaatan barang milik daerah.
 - c. Hasil pengujian parsial sub hipotesis terdapat pengaruh pengkoordinasian kerjasama daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumedang.
 - d. Hasil pengujian parsial sub hipotesis terdapat pengaruh pengkoordinasian kerjasama daerah terhadap efektifitas pemanfaatan

barang milik daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumedang.

Selain kesimpulan diatas terdapat beberapa permasalahan dari ketiga variabel yang dijelaskan secara lebih mendalam pada setiap dimensi sebagai berikut:

1. Permasalahan Pengkoordinasian kerjasama Daerah:
 - a. Dimensi Hierarkis: Sekertaris daerah melakukan koordinasi dengan asisten, kepala bagian, dan unsur pimpinan lainnya.
 - b. Dimensi fungsional: kepala bagian melakukan koordinasi dengan kepala bagian di luar organisasia.
 - c. Dimensi Intansional: kepala bagian dan unsur pimpinan lainnya melakukan koordinasi dengan para kasubag dan unsur staf.
2. Permasalahan Efektiivitas pemanfaatan barang milik daerah:
 - a. Dimensi faktor kesadaran: Pegawai Sekertariat daerah mempunyai kesanggupan mampu melaksanakan tugas dan sasaran secara tepat.
 - b. Dimensi aturan: Pegawai Sekertariat daerah mampu menggggunakan bahasa yang sederhana mudah dimengerti dalam memberikan penjelasan.
 - c. Dimensi faktor organisasi: SKDP memiliki sistem yang memudahkan dalam pemanfaatan barang milik daerah dengan mempertimbangkan jangka waktu sewa sebelum dibekerjasamakan dengan pihak ketiga.
 - d. Demensi faktor pendapatan : pegawai yang mempunyai ide terhadap pemanfaatan barang milik daerah masih belum sesuai dengan target yang diharapkan.
 - e. Dimensi faktor kemampuan dan keterampilan pemanfaatan barang milik daerah, seperti tanah dan bangunan tidak dipergunakan melalui proses kerjasama dan dalam

pelaksanaannya masih menemukan kendala.

- f. Dimensi faktor sarana dan prasarana: pengadaan sarana dan prasarana masih belum memenuhi SOP untuk para pegawainya.
3. Permasalahan Peningkatan pendapatan asli daerah:
 - a. Dimensi Intensifikasi: masih tidak termonitoringnya pengawasan pemanfaatan barang daerah dan kerjasama daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
 - b. Dimensi ektensifikasi: Pantepantarif sesuai dengan Undang-Undang yang belaku tetapi masih belum sesuai dengan kejelasanatas prioritas pencapaian.

Berdasarkan hasil yang telah dikemukakan diatas, maka hasil penelitian ini berimplikasi pengkoordinasian kerjasama daerah, efektifitas pemanfaatan barang milik daerah, dan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah secara umum baik, namun masih ada kendala-kendala yang masih harus diperbaiki. Dimana penyebabnya adalah masih rendahnya variabel peningkatan pendapatan asli daerah dan belum optimalnya efektifitas pemanfaatan barang milik daerah dan pengkoordinasian kerjasama daerah.

Berdasarkan temuan penelitian, kajian teoritik dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Adanya perbaikan dalam Pengkoordinasian Kerjasama Daerah dan Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan cara meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan meningktakan pengkoordinasian antara kerjasama daerah dengan seluruh satuan perangkat daerah.

2. Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan barang milik daerah, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan seluruh stake holder serta meningkatkan pengelolaan dan disiplin dalam bekerja,
3. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu dengan meningkatkan dukungan dari pejabat atau instansi, meningkatkan sosialisasi, bimtek dalam upaya meningkatkan SDM, dan mengadakan kerjasama dengan badan diklat/lembaga pendidikan swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- BSNP. 2000. *Peraturan Mendiknas RI No. 41 Tahun 2007 tentang: Standar Proses*. Jakarta: BSNP
- Burhanuddin. 1994. *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Castetter, W. B. 1996. *The Human Resource Function in Educational Administration*. New Jersey: Merrill, an Lmprint of Prentice Hall
- Dadi, Permana H. 2000. *Manajemen Berbasis Sekolah Dan Kepentingan Mandiri Kepala Sekolah*. Jakarta. Sarana Panca Karya Nusa
- Dimiyati dan Mudjiono. 1999. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Djali. 2012. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djamarah, Saiful Bahri. 2011. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fattah, N. 2000. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamalik, Oemar. 1990. *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Hamzah. 2012. *Teori Motivasi dan Pengutarannya*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herni Susilawati, 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa Mts Negeri Jatinunggal Kabupaten Sumedang*. Tesis. STIA Sebelas April Sumedang
- Iskandar Jusman, 2001. *Administrasi Negara*. Bandung, Puspa